

**PEMANFAATAN WEBSITE SATU DATA INDONESIA
DALAM Mendukung OPEN GOVERNMENT DATA
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nurul Ainun Habiba

NPP: 32.0137

Asdaf Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: nurulainunhabiba26@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eem Nurnawati, SP.M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The South Solok Regency Government in order to support open government data by utilizing facilities in the form of the Satu Data Indonesia website which is intended as a media for publishing sectoral data originating from all Regional Devices within the South Solok Regency Government. However, the utilization of the website is still not optimal, because the quality of the published data still does not meet the four principles of Satu Data Indonesia, namely metadata, data standards, data interoperability, and reference codes. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the extent to which the utilization of the Satu Data Indonesia website supports open government data in South Solok Regency, as well as to identify obstacles and efforts that have been made by the local government. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with observation, documentation and interview data collection techniques, involving 11 informants whose data was then analyzed using the miles and hubberman technique, namely reduction, presentation and depiction of conclusions and data verification. The theory used is the Elements of Successful E-Government Development (Indrajit, 2016) with dimensions of support, capacity, and value. **Result:** The results of the study based on Indrajit's theory with three dimensions, namely the support dimension, there are regulations that are the legal basis for implementation, but training and socialization have not been carried out consistently and do not target permanent officers in each regional apparatus, the capacity dimension still finds an imbalance between the needs and availability of human resources, and the value dimension, the website has provided utility for academics and business actors, but has not evenly reached the general public due to limited interactive features and minimal public socialization. **Conclusion:** The utilization of the Satu Data Indonesia website in South Solok Regency is still not optimal because there are still technical, institutional, and human resource constraints. Therefore, it is necessary to strengthen policies, increase human resource capacity, and budget support so that the implementation of open government data can run optimally and sustainably.*

Keywords: *Satu Data Indonesia; Open Government Data; E-Government; South Solok Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mendukung *open government data* dengan memanfaatkan sarana berupa *website* Satu Data Indonesia yang diperuntukkan sebagai media publikasi data-data sektoral yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Namun, dalam pemanfaatan *website* tersebut masih belum optimal, karena kualitas data yang terpublikasi masih belum memenuhi empat prinsip Satu Data Indonesia yaitu metadata, standar data, interoperabilitas data, dan kode referensi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan *website* Satu Data Indonesia dalam mendukung *open government data* di Kabupaten Solok Selatan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan melibatkan 11 informan yang kemudian datanya dianalisis dengan teknik *miles and huberman* yaitu reduksi, penyajian dan penggambaran kesimpulan dan verifikasi data. Teori yang digunakan yaitu Elemen Sukses Pengembangan E-Government (Indrajit, 2016) dengan dimensi *support*, *capacity*, dan *value*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian berdasarkan teori Indrajit dengan tiga dimensi yaitu dimensi *support* terdapat regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan, namun pelatihan dan sosialisasi belum berjalan konsisten dan tidak menjangkau petugas tetap di setiap perangkat daerah, dimensi *capacity* masih ditemukan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, dan dimensi *value*, *website* telah memberikan nilai guna untuk akademisi dan pelaku usaha, namun belum secara merata menjangkau masyarakat umum karena keterbatasan fitur interaktif dan minimnya sosialisasi publik. **Kesimpulan:** Pemanfaatan *website* Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan masih belum optimal karena masih terdapat kendala teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan anggaran agar implementasi *open government data* dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Satu Data Indonesia; Open Government Data; E-Government; Kabupaten Solok Selatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital dan informasi saat ini, data telah menjadi aset strategis yang sangat berharga bagi negara. Data yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang tepat, perumusan kebijakan yang efektif, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ketersediaan data yang terbuka dan dapat diakses oleh publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip *open government* yang transparan dan akuntabel (Lusy, 2021).

Sejalan dengan semangat tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya harmonisasi dan integrasi data antar tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan berbasis data (Maulidya & Rozikin, 2022). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia hadir sebagai regulasi untuk memperkuat akurasi dan keterbukaan data, serta mengatasi kendala organisasi perangkat daerah

dalam penyediaan data statistik. Sebagai bentuk implementasi dari regulasi tersebut, Satu Data Indonesia diluncurkan pada tanggal 23 Desember 2022 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai platform nasional pengumpulan dan penyediaan data yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat luas. Platform ini bertujuan untuk menyediakan data terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperkuat kolaborasi antar instansi melalui data yang konsisten dan terstandarisasi. Implementasi kebijakan dan penerapan praktik keterbukaan data dapat meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat akses masyarakat terhadap informasi publik, serta membuka peluang bagi keterlibatan aktif warga dalam proses pembuatan kebijakan. Maka pemerintahan terbuka berarti dalam tata kelola pemerintahan masyarakatnya memiliki akses dan kontribusi terhadap informasi dan dokumen dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ikhlaluddin, 2020).

Konsep Satu Data Indonesia dijalankan berdasarkan empat prinsip utama, yaitu: standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi (Anaman-torgbor et al., 2025). Keempat prinsip ini menjadi pedoman dalam pengelolaan data lintas sektor dan lintas instansi, termasuk di tingkat daerah. Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia melalui penerbitan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pemanfaatan website Satu Data Indonesia di daerah ini dimulai sejak 2022 melalui portal resmi <https://opendata.solselkab.go.id/> sebagai sarana penyedia data sektoral dari berbagai organisasi perangkat daerah. Penerapan *website* Satu Data Indonesia ini memiliki tujuan strategis dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan fokus pada terwujudnya tata kelola yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, serta menghasilkan layanan publik yang dapat diandalkan (Tejedo-romero et al., 2025).

Meskipun demikian, pemanfaatan portal ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur jaringan yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Pada awal tahun 2023, tercatat terdapat 18 titik blankspot jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Solok Selatan, dengan kualitas jaringan terendah berada di Kecamatan Sangir Batang Hari, dan sebaran terbanyak di Kecamatan Sungai Pagu. Selain itu, permasalahan seperti ketidakkonsistenan format dan metadata antar lembaga, rendahnya kesadaran terhadap urgensi data terbuka, serta jaringan minimnya alokasi anggaran menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam optimalisasi pemanfaatan portal Satu Data (Lambert et al., 2025). Evaluasi terkini juga menunjukkan bahwa prinsip interoperabilitas data belum sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaannya (Laporan Evaluasi Statistik Sektoral, 2024). Temuan serupa juga terjadi di daerah lain, seperti pada penelitian terkait koordinasi Satu Data Indonesia di Kota Padang oleh (Azizah & Permana, 2024) yang menyebutkan bahwa keterbatasan tenaga ahli, rendahnya kesadaran pegawai, serta minimnya dukungan anggaran turut menjadi kendala besar dalam implementasi SDI.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana regulasi yang dimaksud dibuat dengan pertimbangan yaitu dapat meningkatkan akurasi dan keterbukaan data, sekaligus mengatasi kendala terkait data yang selama ini menghambat organisasi perangkat daerah setempat dalam menyediakan data statistik (Anisa et al., 2023). Melihat kompleksitas tantangan tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana website Satu Data Indonesia dimanfaatkan di Kabupaten Solok Selatan dalam mendukung prinsip open government data yaitu standar data, meta data, interoperabilitas data, dan kode referensi (Alamsyah et al., 2020). Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan program ini, serta untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan rekomendasi

strategis agar pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan terkait pemanfaatan website Satu Data Indonesia dalam mendukung open government data di Kabupaten Solok Selatan masih menyisakan berbagai kesenjangan yang signifikan. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya mengimplementasikan kebijakan ini melalui penerbitan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2022, serta menyediakan portal khusus di laman <https://opendata.solselkab.go.id/>, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan data masih belum optimal (Imaduddin et al., 2023).

Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan infrastruktur, terutama akses jaringan internet yang belum merata. Berdasarkan data dari Website Satu Data Solok Selatan tahun 2023, terdapat 18 titik daerah blankspot di wilayah kecamatan, dengan kondisi jaringan terburuk ditemukan di Kecamatan Sangir Batang Hari. Hal ini menjadi penghambat utama dalam pengumpulan, pengolahan, serta distribusi data antar organisasi perangkat daerah. Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan statistik sektoral menunjukkan bahwa kualitas data yang tersedia belum memenuhi empat prinsip utama Satu Data Indonesia, terutama pada aspek interoperabilitas data, yang menjadi indikator penting dalam menjamin keterpaduan dan integrasi informasi antar sistem (Laporan Evaluasi Statistik Sektoral, 2024).

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Azizah & Permana, 2024) di Kota Padang menunjukkan bahwa permasalahan serupa juga ditemukan di daerah lain, yakni kurangnya SDM yang kompeten, lemahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya pengelolaan data, serta minimnya alokasi anggaran. Namun, belum ada penelitian serupa yang dilakukan secara mendalam di Kabupaten Solok Selatan, khususnya yang mengkaji sejauh mana efektivitas pemanfaatan website Satu Data Indonesia dalam mendukung prinsip-prinsip open government data. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan mengenai efektivitas implementasi website Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan. Di satu sisi, kebijakan dan infrastruktur sudah mulai dibangun; di sisi lain, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan yang kompleks (Adrian et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur mengenai efektivitas pemanfaatan SDI di daerah ini dan memberikan masukan strategis bagi perbaikan kebijakan pengelolaan data terbuka di tingkat lokal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh sejumlah penelitian terdahulu yang membahas implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, keterbukaan informasi publik, dan pengembangan sistem e-government di tingkat daerah. Penelitian-penelitian ini menjadi acuan penting dalam merumuskan arah penelitian terkait pemanfaatan website Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan dalam mendukung open government data. Penelitian oleh (Amelia & Rahayu, 2023) berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia: Peran BPS-Statistik Indonesia sebagai Pelaksana Data Statistik” menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data oleh BPS berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan di beberapa aspek. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dan metode kualitatif deskriptif. Kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas implementasi Satu Data Indonesia, namun penelitian Amelia dan Rahayu lebih berfokus pada peran BPS secara nasional, sedangkan penelitian ini mengkaji pemanfaatan di tingkat kabupaten. (Setianingrum et al., 2021) dalam penelitiannya “Penerapan E-Government

dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung” menggunakan teori e-government dari Indrajit serta metode SWOT dan litmus test. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan kebijakan, SDM, serta infrastruktur merupakan faktor penentu suksesnya e-government. Persamaan terletak pada penggunaan teori Indrajit, namun lokasi dan fokus pelayanan berbeda, karena penelitian ini lebih menyoroti Satu Data Indonesia dalam konteks transparansi data publik. Penelitian oleh (Putra Prabujaya et al., 2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan” menggunakan pendekatan kualitatif dan teori Edward III. Temuan penelitian ini menunjukkan kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan SOP. Penelitian ini memiliki kesamaan tema besar, yaitu implementasi kebijakan Satu Data, namun berbeda lokasi dan teori yang digunakan. Penelitian (Oktaf Tegar Saputra, 2021) yang berjudul “Pengelolaan Website Semarang Satu Data sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Publik” mengkaji sistem integrasi informasi publik di Kota Semarang. Ia menyoroti bahwa kendala teknis dan proses input manual memperlambat efektivitas sistem. Persamaannya terletak pada tujuan yang sama yaitu mendukung keterbukaan informasi melalui sistem Satu Data, sedangkan perbedaannya adalah dari sisi teori dan pendekatan yang digunakan. Selanjutnya, (Ferdinand Ihsan Siregar, 2022) dalam penelitiannya “Kualitas Website Asahan Satu Data dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi” menggunakan teori kualitas website oleh Alvaro Rocha dan pendekatan kualitatif. Ia menilai kualitas teknis dan konten website cukup baik, namun terdapat kekurangan dalam kelengkapan dan pembaruan data. Penelitian ini mirip dalam hal objek kajian, yaitu website Satu Data daerah, namun berbeda dalam pendekatan teoritis karena penelitian ini menggunakan teori Elemen Sukses Pengembangan E-Government (Indrajit et al., 2021) dengan dimensi support, capacity, dan value. Sebagai tambahan referensi dari sivitas akademika IPDN, peneliti mengacu pada buku karya (Indrajit, 2004) “Manajemen Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, yang menjadi dasar teori utama dalam penelitian ini. Buku ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi e-government ditentukan oleh tiga elemen utama: dukungan (support), kapasitas (capacity), dan nilai/manfaat (value).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian, pendekatan teori yang digunakan, serta lokasi penelitian yang bersifat spesifik dan belum banyak dikaji. Penelitian ini menyoroti pemanfaatan website Satu Data Indonesia dalam mendukung open government data di Kabupaten Solok Selatan, sebuah konteks daerah yang hingga saat ini belum mendapatkan perhatian cukup dalam kajian ilmiah nasional maupun jurnal akademik. Berbeda dengan penelitian (Amelia & Rahayu, 2023) yang lebih berfokus pada peran BPS sebagai pelaksana data statistik secara nasional, penelitian ini mengkaji aspek pemanfaatan data oleh pemerintah daerah melalui website sebagai platform keterbukaan informasi. Demikian pula, jika dibandingkan dengan (Putra Prabujaya et al., 2023) yang meneliti implementasi kebijakan di tingkat provinsi, penelitian ini mengambil konteks kabupaten, sehingga menghasilkan perspektif kebijakan yang lebih mikro dan berbasis realitas lokal. Dari sisi pendekatan teori, penelitian ini menggunakan teori Elemen Sukses Pengembangan E-Government oleh (Indrajit, 2016) dengan tiga indikator utama: support, capacity, dan value. Teori ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Edward III (seperti pada penelitian Putra Prabujaya dan Amelia), maupun teori kualitas website seperti dalam penelitian (Ferdinand Ihsan Siregar, 2022). Dengan menggunakan teori Indrajit, penelitian ini mampu memberikan gambaran holistik terkait dukungan kelembagaan, kapasitas sumber daya, serta manfaat aktual dari implementasi website Satu Data Indonesia. Penelitian ini juga mengangkat

permasalahan infrastruktur jaringan daerah terpencil, ketidakterpenuhinya prinsip interoperabilitas data, dan rendahnya kompetensi SDM daerah sebagai isu utama, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Fokus pada evaluasi pemanfaatan, bukan hanya pada implementasi kebijakan, juga menjadi salah satu kebaruan metodologis dalam kajian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah baru yang tidak hanya mengisi kekosongan literatur pada konteks Kabupaten Solok Selatan, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi berbasis data terbuka secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan website Satu Data Indonesia dalam mendukung open government data di Kabupaten Solok Selatan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana pemanfaatan website Satu Data Indonesia dalam mendukung open government data di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini didasarkan pada teori Elemen Sukses Pengembangan E-Government yang dikemukakan oleh (Indrajit, 2016), yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu: support (dukungan kelembagaan dan kebijakan), capacity (ketersediaan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran), serta value (manfaat dari keberadaan sistem bagi masyarakat dan pemerintah).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, Kepala Bidang Statistik, staf teknis pengelola data, dan perwakilan dari perangkat daerah pengguna sistem. Observasi dilakukan di lingkungan kerja Dinas Kominfo dan fasilitas infrastruktur penunjang sistem informasi. Sedangkan dokumentasi mencakup dokumen regulasi, laporan statistik sektoral, dan konten dari website <https://opendata.solselkab.go.id/>. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia, dan snowball sampling digunakan untuk memperluas data dengan bantuan referensi dari informan awal (Amure & Agarwal, 2025). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan,

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pemanfaatan website Satu Data Indonesia dalam mendukung open government data di Kabupaten Solok Selatan menggunakan teori Elemen Sukses Pengembangan E-Government oleh (Indrajit, 2016) yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu Support, Capacity, dan Value. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi sejauh mana website digunakan, kendala dalam implementasi, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah.

3.1. Pemanfaatan Website Satu Data Indonesia dalam Mendukung Open Government Data di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

3.1.1. Elemen Pendukung (Support)

Elemen support mengacu pada komitmen kelembagaan, regulasi pendukung, serta inisiatif strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menunjukkan komitmen awal melalui penyusunan Masterplan Teknologi Informasi, yang mencakup Satu Data Indonesia sebagai bagian dari kerangka pengembangan Smart City dan SPBE. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan.

Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Dukungan dalam bentuk sosialisasi kepada perangkat daerah masih belum merata dan tidak tepat sasaran. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Diskominfo terkendala oleh tingginya rotasi peserta, sehingga informasi teknis tentang penggunaan sistem Satu Data harus diulang terus-menerus pada setiap kegiatan. Kelembagaan juga belum sepenuhnya siap, terbukti dari belum adanya wali data sektoral di banyak perangkat daerah. Hal ini menyebabkan pengumpulan data masih terpusat di Diskominfo, dan prosesnya dilakukan secara manual, sehingga berisiko menyebabkan keterlambatan dan ketidakkonsistenan data (Juliansyah, n.d.).

3.1.2 Elemen Kapasitas (Capacity)

Elemen capacity meliputi ketersediaan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Penelitian menemukan bahwa Diskominfo Kabupaten Solok Selatan masih kekurangan 37 orang pegawai dari kebutuhan ideal untuk mengelola sistem Satu Data. Setiap perangkat daerah juga belum memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab untuk mengunggah dan memperbarui data pada sistem

Dari sisi infrastruktur, masih terdapat 18 titik wilayah blankspot yang belum memiliki jaringan telekomunikasi, terutama di Kecamatan Sangir Batang Hari. Ketiadaan server internal juga menjadi kendala utama. Saat ini, Diskominfo masih bergantung pada penyedia layanan pihak ketiga seperti PT Telkom dan BUMNag untuk mendistribusikan jaringan. Dalam hal pendanaan, program Satu Data Indonesia belum menjadi prioritas anggaran pemerintah daerah (Aulia Putri et al., 2023).. Sebagian besar alokasi dana masih terfokus pada pembangunan fisik dan kegiatan ekonomi masyarakat, sementara transformasi digital belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

3.1.3 Elemen Nilai (Value)

Elemen value mencerminkan sejauh mana manfaat dari website Satu Data Indonesia dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Solok Selatan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan data. Sistem ini mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang berbasis data, serta mengeliminasi duplikasi data antar instansi, yang sebelumnya menjadi penghambat efisiensi birokrasi.

Namun, manfaat ini belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sebagian besar warga, terutama di wilayah perdesaan, tidak mengetahui keberadaan website tersebut atau tidak memahami cara mengakses dan menggunakannya. Literasi digital menjadi tantangan utama, di mana sosialisasi dan pelatihan pengguna masih sangat minim

Dari sisi stakeholder seperti mahasiswa dan pelaku usaha, website ini dinilai berguna untuk kebutuhan penelitian dan pengambilan keputusan bisnis. Namun kebutuhan mereka terhadap data

terbuka yang dapat digunakan lintas sistem belum sepenuhnya terpenuhi, karena saat ini data masih dalam format publikasi statis (PDF) dan belum tersedia API untuk integrasi antar sistem.

3.2 Kendala yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Pemanfaatan Website Satu Data Indonesia

Dalam Pemanfaatan website Satu Data Indonesia yang berperan dalam mendukung Open Government Data di Kabupaten Solok Selatan ditemukan beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Masalah-masalah tersebut antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya khususnya bidang SDI. Hambatan atau kendala lainnya terkait dengan Infrastruktur jaringan yang mana Diskominfo Kabupaten Solok Selatan belum memiliki server sendiri, Sosialisasi yang tidak tepat sasaran, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penyajian metadata dan format data yang menghambat keterpakaian data.

3.3 Upaya yang dilakukan Diskominfo dalam mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pemanfaatan website Satu Data Indonesia dalam mendukung open government data di Kabupaten Solok Selatan Povinsi Sumatera Barat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan sosialisasi kepada perangkat daerah sebanyak tiga kali dengan pendekatan teknis yang lebih spesifik, penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan spanduk, serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti PT Indonesia Comnet Plus (Icon+) dan Badan Usaha Milik Nagari dalam pengembangan infrastruktur jaringan di daerah blankspot. Selain itu, pemerintah juga telah merancang Masterplan Teknologi Informasi dan menetapkan regulasi melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Meskipun demikian, beberapa aspek teknis dan kelembagaan masih perlu diperkuat agar pemanfaatan SDI dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan website Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan dalam mendukung open government data belum berjalan secara optimal. Meskipun telah tersedia regulasi daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022, serta infrastruktur teknologi yang cukup, masih terdapat sejumlah kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan jaringan, dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amelia & Rahayu, 2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia secara nasional, khususnya oleh BPS, juga mengalami hambatan dalam aspek koordinasi lintas instansi, rendahnya literasi data, serta belum optimalnya integrasi sistem. Sama halnya dengan temuan penelitian ini, aspek koordinasi dan distribusi peran menjadi titik lemah utama yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum maksimal.

Berbeda dengan temuan (Setianingrum, 2021) yang meneliti penerapan e-government di DPMPTSP Kota Bandung dan menyimpulkan bahwa pelayanan digital telah berjalan baik karena adanya dukungan SDM yang memadai dan sistem pelaporan yang terintegrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di Solok Selatan masih menjadi hambatan signifikan. Di Diskominfo Solok Selatan, pegawai yang menangani teknologi informasi sebagian besar berlatar belakang non-TIK, dan belum tersedia pusat layanan digital yang ideal.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Putra Prabujaya et al., 2023) yang

mengungkapkan bahwa implementasi Satu Data di Sumatera Selatan juga menghadapi tantangan serupa pada aspek komunikasi dan pemahaman teknis. Penelitian ini juga menambahkan bahwa kesenjangan kompetensi dan kurangnya wali data tetap menyebabkan hilangnya kesinambungan dalam pengelolaan data sektoral antar perangkat daerah.

Penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian (Ferdinandus Siregar, 2022) mengenai kualitas website Asahan Satu Data. Dalam penelitiannya, kualitas tampilan dan kemudahan akses website tergolong baik, sementara dalam penelitian ini ditemukan bahwa website SDI Kabupaten Solok Selatan masih menyajikan data dalam format statis (PDF) dan belum menyediakan API (Application Programming Interface) untuk integrasi sistem data terbuka, yang menghambat prinsip keterbukaan dan interoperabilitas.

Lebih lanjut, temuan ini juga memperkuat kajian (Azizah & Permana, 2024) terkait lemahnya kapasitas kelembagaan dan kurangnya anggaran operasional dalam pengelolaan data pemerintah daerah. Penelitian ini menambahkan bahwa tidak hanya keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan, namun juga tidak adanya penugasan resmi terhadap wali data di setiap OPD, yang menyebabkan tanggung jawab pemutakhiran data hanya dibebankan kepada Diskominfo sebagai koordinator.

Dari sisi manfaat (value), penelitian ini memperkuat temuan (Zhao et al., 2022) yang menunjukkan bahwa akses terhadap informasi publik yang akurat mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Solok Selatan, data SDI telah dimanfaatkan oleh mahasiswa, pelaku usaha, dan aktivis sosial untuk keperluan penelitian dan pemantauan kinerja pemerintah daerah. Namun, pemanfaatan tersebut belum merata karena belum tersedianya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat umum. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam kajian pemanfaatan website Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten, terutama dalam menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM, konsistensi kebijakan antar OPD, serta penyediaan data dalam format terbuka yang dapat digunakan lintas sektor. Elemen support, capacity, dan value dari teori Indrajit terbukti menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi sistem data terbuka di daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan website Satu Data Indonesia dalam mendukung open government data di Kabupaten Solok Selatan belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 dan menyusun Masterplan Teknologi Informasi, implementasi teknisnya masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya infrastruktur jaringan, serta rendahnya literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan data terbuka.

Dari sisi dukungan kelembagaan (support), terdapat regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan, namun pelatihan dan sosialisasi belum berjalan konsisten dan tidak menjangkau petugas tetap di setiap perangkat daerah. Pada aspek kapasitas (capacity), masih ditemukan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, serta belum tersedianya pusat layanan teknis (service desk) dan server daerah. Sedangkan dari aspek hasil dan manfaat (value), website telah memberikan nilai guna untuk akademisi dan pelaku usaha, namun belum secara merata menjangkau masyarakat umum karena keterbatasan fitur interaktif dan minimnya sosialisasi publik.

Temuan penting dari penelitian ini memperluas pemahaman bahwa keberhasilan implementasi sistem data terbuka di daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan infrastruktur,

tetapi sangat bergantung pada kesiapan SDM, budaya birokrasi, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan meningkatkan literasi digital, mengembangkan fitur terbuka (open API), serta menjalin kolaborasi aktif dengan pihak swasta dan akademisi untuk mendukung ekosistem data yang lebih transparan dan partisipatif. Dengan adanya Portal Satu Data Kabupaten Solok Selatan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah, mendorong inovasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Magfirra, 2024).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek cakupan wilayah dan waktu pelaksanaan. Studi hanya difokuskan pada instansi utama pengelola data (Diskominfo) dan beberapa perangkat daerah di Kabupaten Solok Selatan, tanpa menjangkau pihak pengguna data secara lebih luas. Selain itu, karena menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini belum mampu mengukur dampak kuantitatif dari pemanfaatan website terhadap partisipasi masyarakat secara lebih detail.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan kontekstual. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mix methods untuk mengukur dampak pemanfaatan data terhadap proses pengambilan keputusan, pelayanan publik, serta keterlibatan masyarakat. Selain itu, studi serupa juga perlu dilakukan di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat guna memperoleh pemetaan komparatif terhadap efektivitas implementasi Satu Data Indonesia di tingkat lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, yang telah memberikan kesempatan dan akses bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan dari berbagai perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan moral, teknis, dan ilmiah yang diberikan sangat berarti bagi terselesaikannya karya ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, V. dkk. (2021). Application of executive information system for COVID-19 reporting system and management: An example from DKI Jakarta, Indonesia (hlm. 387–397). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.09738>
- Alamsyah, A. dkk. (2020). *Technology and Business Management: Technology Based Economic Growth and Government Policy Open Data Analytical Model for Human Development Index Optimization to Support Government Policy*. DOI:10.48550/arXiv.1809.00189
- Alif & Warsono, H. (2019). Analisis Pengembangan E-Government Dalam Penyediaan Akses Informasi Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl.*, 8(4), 510–524. DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.25097
- Amelia, R. & Rahayu, A. (2023). Analysis of Indonesia'S One Data Policy Implementation: the Role of the Central Statistics Agency As a Statistical Data Coach. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 708. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3115>
- Amure, R., & Agarwal, N. (2025). A comparative evaluation of social network analysis tools : performance and community engagement perspectives. *Social Network Analysis and Mining*.

- <https://doi.org/10.1007/s13278-025-01409-y>
- Anaman, J. dkk (2025). *Factors associated with male acceptance of modern contraceptive methods . A descriptive cross-sectional study in a peri- urban municipality.* 7. DOI: 10.1186/s40834-025-00338-7
- Anisa, Z. dkk (2023). Proses Kolaborasi Kebijakan Satu Data Salatiga Dalam Menyediakan Informasi Publik Di Kota Salatiga. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(3), 1–23. DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.40042
- Azizah, Y., & Permana, I. (2024). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
- Lusy, R. (2021). *INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SMART CAMPUS DATA BASE.* 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2308>
- Ikhbaluddin, (2020). Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Menerapkan Teknologi Informasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 41–57. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2316>
- Imaduddin, D. M., dkk(2023). Implementation Of Infrastructure Policies to Support Safe and Sanitary Housing in Depok City Area. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15(2), 151–163. <https://doi.org/10.33701/jtp.v15i2.3693>
- Indrajit, A., van Loenen, B., Suprajaka, Jaya, V. E., Ploeger, H., Lemmen, C., & van Oosterom, P. (2021). Implementation of the spatial plan information package for improving ease of doing business in Indonesian cities. *Land Use Policy*, 105, 105338. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105338>
- Juliansyah, R. (2025). *Implementation of EMR System in Indonesian Health Facilities : Benefits and Constraints.* DOI: 10.7454/ihpa.v10i1.1140
- Setianingrum, K. dkk. (2021). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat “Implementation Of Egovernment In Improving The Quality Of Public Service In Department Of Inves. *Visioner*, 13(2), 145–157. DOI: <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.344>
- Lambert, L. K. dkk. (2025). *An early evaluation of team consistency and scope optimization in team-based cancer care.* *BMC Cancer*, 25(371). <https://doi.org/10.1186/s12885-025-13644-9>
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>
- Putra Prabujaya, S., Aryansah, J. E., Muhammad, D., & Febriansyah, F. (2023). Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 18–33. <https://doi.org/10.47753/pjap.v4i2.72>
- Tejedo-romero, F., Filipe, J., Esteves, F., Jesus, M., & Ribeiro, G. (2025). The usability of Brazilian government open data portals : ensuring data quality. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04404-y>
- Zhao, Y., Liang, Y., Yao, C., & Han, X. (2022). Key factors and generation mechanisms of open government data performance: A mixed methods study in the case of China. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101717. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101717>